

---

## JURNAL WIDYA GANECWARA

---

### **Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat**

**Syahriar Abdullah<sup>1</sup>,**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

**Listia Riani<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

---

#### **Info Artikel**

**Kata kunci:**

*Flypaper effect*, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh DAU, PAD dan kemungkinan terjadinya *Flypaper Effect* serta pengaruhnya terhadap rasio keuangan pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah dan Pendapatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sampel dalam penelitian ini adalah data dari 17 Kabupaten dan 9 Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dan terjadi *Flypaper Effect*. Hasil pengujian koefisien regresi (Uji-t) pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel ( $16,713988 > 1,97882$ ) dengan nilai positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa terjadinya *flypaper effect* berdampak pada menurunnya kinerja keuangan daerah.

---

✉ Alamat korespondensi :

FEB UTP Surakarta

Jl. Walanda Maramis No.56, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,

Jawa Tengah 57135

---

## PENDAHULUAN

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha serius untuk melaksanakan desentralisasi terjadi setelah rezim orde baru tumbang dan berganti dengan orde reformasi. Pada masa itu pemerintah

habibie memberlakukan hukum desentralisasi baru untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang otonomi daerah kemudian di sempurnakan kembali dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdiri dari atas tiga macam, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DAK). Selain dana perimbangan pemerintah daerah juga mendapat dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU di berikan pemerintah pusat untuk

membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD yang di kumpulkannya. Pengembangan suatu daerah dapat di sesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan ciri khas antar daerah. Hal ini di nilai sebagai suatu kesempatan yang sangat baik dan merupakan salah satu tantangan yang harus di hadapi oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan Ekonomi Lokal, apabila peningkatan ekonomi lokal lebih cepat terwujud maka pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah (Lin dan Liu, 2002; Mardiasmo, 2002). Kemandirian daerah sering kali di ukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah, di mana pajak dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Apabila suatu daerah telah dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya tentu saja tingkat perekonomiannya tinggi yang kemudian berimbas pada kinerja keuangan daerah.

Permasalahan yang timbul dalam Dana Alokasi Umum ini terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum untuk pemerataan keuangan antar daerah. Sedangkan pemerintah daerah menganggap pemberian dana ini untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Perbedaan pemahaman inilah yang menyebabkan adanya respon Belanja Daerah yang lebih banyak oleh pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli

Daerahnya sendiri atau di kenal dengan istilah "*Flypaper Effect*" Wahyuni dan Supheni (2017).

Peneliti sebelumnya seperti Inayati dan Setiawan (2017) yang melakukan penelitian tentang fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2013, yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Maimunah, 2006 melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra pada tahun 2004, yang menyimpulkan bahwa nilai PAD dan DAU mempengaruhi besarnya Belanja Daerah, dan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatra. Dan penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah serta dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dengan alasan Kabupaten/kota di

Propinsi Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan ketersediaan data. Mengingat jumlah Dana transfer di Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat yang semakin meningkat dari tahun 2012 hingga 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh *Flypaper Effect* DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dengan menggunakan data runtun waktu (time series) (2012-2016) sehingga di harapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Selain itu penelitian ini juga di hubungkan dengan kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

## TINJAUAN TEORETIS

### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Daerah dan DPRD, telah menetapkan Peraturan Daerah (Permendagri No. 13 tahun 2006) mengenai APBD, yang menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dan merupakan alat/wadah yang berfungsi untuk menampung berbagai macam kepentingan publik yang nantinya akan diwujudkan melalui beberapa kegiatan dan program di mana masyarakat bisa merasakan manfaatnya pada saat tertentu. Tujuan penyusunan APBD sendiri sebenarnya adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD ini di harapkan nantinya pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat di

hindari. Berdasarkan Pasal (79) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, pasal (3) dan (4), Undang-undang Nomor : 25 tahun 1999 dan pasal (157), Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dengancara bergantung pada keadaan perekonomian di suatu daerah dengan menggali potensi pada sumber-sumber kekayaan asli daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah juga di peroleh dari berbagai usaha pemerintah daerah yang nantinya penerimaan dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan semua kebutuhan guna peningkatan pelayanan publik dan juga

pelaksanaan pembangunan daerah. Menurut Abdul Halim, 2007, dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah" beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah

ini dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang d pisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ( Provinsi, Kabupaten,dan Kota) ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

### **Belanja Daerah**

Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk kas keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Halim, 2002 : 73). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Unsur Belanja Daerah yang digunakan dalam

APBD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja tidak terduga (Wahyuni dan Supheni, 2017).

Belanja daerah di kelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Rahmawati dan Suryono, 2015). Kelompok belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. kelompok belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik, 2017).

### ***Flypaper Effect***

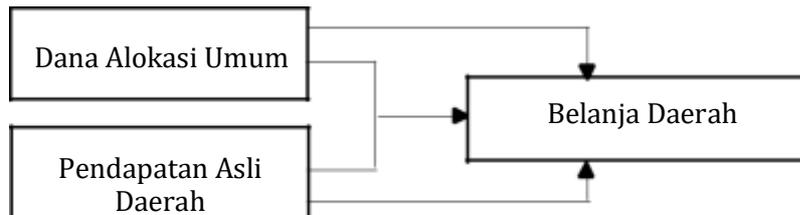
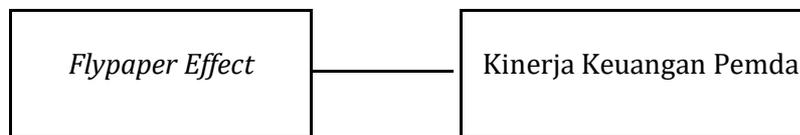
*Flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006). Atau dengan kata lain *flypaper effect* terjadi karena Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari *transfer/grants* atau

spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, sehingga yang terjadi adalah pemborosan dalam hal Belanja Daerah. *Unconditional grants* yang di proksikan dengan Dana Alokasi Umum di tentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal di kurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang di alokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Halim, 2007)

**Gambar 1****Rerangka Pemikiran****Model 1.****Model 2.**

## Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan pada gambar di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Dana Alokasi Umum (DAU)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)t.
- H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)t.
- H3 : Pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum (DAU)t-1 terhadap Belanja Daerah (BD)t lebih besar daripada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)t-1 terhadap Belanja Daerah (BD)t.
- H4 : *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang telah di sediakan dan di publikasi oleh pihak lain. Metode dasar yang di lakukan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yaitu berusaha menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, dengan menyoroti hubungan yang telah di rumuskan sebelumnya (Nazir, 2003).

### Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan jangka waktu lima tahun, yaitu mulai dari tahun 2012-2016, maka total sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 data.

## Data dan Sumber Data

Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu (time Series) yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yakni data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah (BD), Total Pendapatan Daerah dan Laporan Keuangan (neraca, laporan realisasi APBD, laporan aliran kas) dari tahun 2012 sampai tahun 2016, yang di peroleh melalui situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik.

## Definisi Operasional Variabel

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Variabel Dependen

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD).

### Variabel Independen

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Alokasi Umum

## Metode Analisis Data

- Analisis Deskriptif
- Asumsi Klasik
  - Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

#### d. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji  $t$  dan  $F$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

### Analisis Regresi

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (simple regression) dan regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan software SPSS. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel terhadap variabel dependen. Sedangkan analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (BD) secara *Cross-Section* dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Di mana :

$Y$  = Jumlah Belanja Daerah (BDt)  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien Regresi  
 $X$  = Jumlah (DAUt-1) atau (PADt-1)  
 $e$  = Error Term

Sedangkan Analisis Regresi Berganda di gunakan untuk memprediksi apakah PAD dan DAU secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan Regresi yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Di mana :

$Y$  = Jumlah Belanja Daerah (BDt)

$A$  = Konstanta

Koefisien Regresi  
 $\beta 1 = 1$

$x 1 = (\text{DAUt}-1)$

Koefisien Regresi  
 $\beta 2 = 2$

$x 2 = (\text{PADt}-1)$

$E = \text{Error Term}$

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi tunggal, koefisien regresi, nilai *t-statistic*,  $R$ ,  $R^2$ , dan *adjusted R<sup>2</sup>* masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Untuk regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Syarat terjadinya *flypaper* adalah apabila efek DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect* (Maimunah, 2006)

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *flypaper effect* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka di lakukan analisis rasio keuangan sebagai penilai kinerja keuangan daerah. Rasio Keuangan yang digunakan yaitu :

### Desentralisasi fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini di maksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang di

kelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah.

Rumus yang di gunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

### Rasio kemandirian

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan sebaliknya apabila rasio kemandirian rendah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat semakin tinggi.

Rumus yang di gunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Sumber Pend.}} \times 100\%$$

### Analisis Statistik Deskriptif

Dari data yang di peroleh sebanyak 130 sampel seperti yang telah di uraikan di atas di peroleh statistik deskriptif yang mencakup  $n$  (banyaknya data yang di peroleh), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan

deviasi standar (standar deviation) dari masing-masing variabel penelitian.

**Tabel 1**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	130	513257046492	6465300553876	2394696623930.1377	1176952260010.10160
DAU	130	281851254000	2163439062000	1093358636739.7388	417342784837.10150
PAD	130	22312089621	2292175674801	503078289287.5000	498960318704.28680
PDP	130	545085308774	24294600373294	2604490725922.9690	2251955532074.24760
Valid N ( <i>listwise</i> )	130				

Sumber : Data sekunder di olah, 2018

**Statistik Deskriptif untuk Belanja Daerah**

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai minimum adalah Kota Banjar pada tahun 2012 sebanyak Rp. 513.257.046.492,00, dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah Kabupaten Bogor pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak Rp. 6.465.300.553.876,00. Jumlah rata-rata hitung untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 2.394.696.623.930,137700, dan untuk jumlah Deviasi Standar di bawah rata-rata yaitu sebesar Rp. 1.176.952.260.010,101600, hal ini berarti bahwa besarnya Belanja Daerah yang di jadikan sampel di dalam

penelitian ini memiliki nilai yang tidak bervariasi.

**Statistik Deskriptif untuk Dana Alokasi Umum**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai minimum adalah Kabupaten Banjar pada tahun 2012 dengan nilai Rp. 281.851.254.000,00, dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah Kabupaten Bogor pada tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 21.634.390.620.000,00. Jumlah rata-rata hitung untuk Dana Alokasi Umum adalah sebanyak Rp. 1.093.358.636.739,738800, dan untuk jumlah standar deviasi yakni di bawah

rata-rata sebesar Rp. 417.342.784.837,101500, hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang tidak bervariasi.

### **Statistik Deskriptif untuk Pendapatan Asli Daerah.**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai minimum adalah Kab. Majalengka pada tahun 2014 dengan nilai Rp. 22.312.089.621,00, dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah Kota Ciamis pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.292.175.674.801,00. Jumlah rata-rata hitung untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebanyak Rp. 503.078.289.287,500000, dan untuk jumlah standar deviasi berada di bawah rata-rata yakni Rp. 498.960.318.704,286800. Hal ini berarti bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang tidak bervariasi.

### **Statistik Desriptif untuk Total Pendapatan Daerah**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki nilai minimum adalah Kota Banjar pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 545.085.308.774,00, dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 yakni sebesar Rp. 24.294.600.373.294,00. Jumlah rata-rata hitung untuk Total Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 2.604.490.725.922,969000, dan untuk jumlah standar deviasi berada di bawah

rata-rata yakni sebesar 2.251.955.532.074,247600. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Total Pendapatan Daerah yang di jadikan sampel dala penelitian ini mempunyai nilai yang tidak bervariasi.

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian uji asumsi klasik di lakukan dilakukan agar data yang digunakan memenuhi kriteria Best, Linear, Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas data, dan uji autokorelasi.

#### **Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas adalah uji yang di lakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas yang di maksud yaitu Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk menguji adanya multikolonieritas yaitu dengan melihat pada Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman Suatu model regresi yang bebas multikolonieritas adalah mempunyai VIF adalah 10 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10 dari setiap independennya. Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi di gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus di penuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar diatas 100 observasi. Karena dalam penelitian ini sampel yang diteliti cukup besar (lebih dari 100 observasi) maka lebih tepat digunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual lag2 (res\_2) memberikan probabilitas signifikan 0.746 hal ini

menunjukkan indikasi tidak adanya autokorelasi antar variable.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka di sebut Homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	DAU	.763	1.311
	PAD	.763	1.311

Sumber : Data Sekunder di olah, 2018

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Langrange Multiplier (LM test)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3760788922.539	56755987042.141		-.066	.947
DAU	.004	.055	.007	.066	.947
1					
PAD	.001	.047	.002	.023	.982
res_2	.030	.092	.030	.324	.746

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : data sekunder di olah, 2018

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk residual lag2 (res\_2) memberikan probabilitas signifikan 0.746 hal ini menunjukkan indikasi tidak adanya autokorelasi antar variable.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka di sebut Homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park.

**Tabel 4****Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji park**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	t	Sig.
(Constant)	-.254	.800
Ln_bd	1.766	.080
1		
Ln_dau	-.381	.704
Ln_pad	-.898	.371

a. Dependent Variable: Lnei

Sumber : Data Sekunder di olah, 2018

Hasil tampilan output SPSS pada Tabel 4 di atas memberikan koefisien parameter beta untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat Heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai Asymp.Sig suatu variabel yang dihasilkan oleh uji

Kolmogorov Smirnov  $> \alpha$  (0.05)

dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut terdistribusi normal. Pada Tabel berikut ini disajikan hasil uji normalitas.

**Tabel 5**  
**Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	130
Mean	-.0001953
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	223163027297.
Std. Deviation	31885000
Absolute	.089
Most Extreme Differences	Positive
Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z	1.011
Asymp. Sig. (2-tailed)	.258

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder di olah, 2018

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Besarnya Kolmogorov Smirnov adalah 1.011 dan signifikan pada 0,258, hal ini berarti  $H_0$  di terima yang berarti data residual berdistribusi normal.

### Analisis Regresi

### Pengaruh DAU dan PAD terhadap BD

Pengujian analisis regresi bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh DAU, PAD dan kemungkinan terjadinya *Flypaper Effect* pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2016 dan hasil pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS 21.0 adalah sebagai berikut.

Tabel 6

## Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-101258764699.734	55833493996.035		-1.814	.072
1 DAU	1.703	.054	.604	31.352	.000
PAD	1.259	.045	.534	27.717	.000

a. Dependent Variable: BD

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel 6 di atas. Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$BD = -101258764699.733630 + 1.703317DAU + 1.259483 PAD$$

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk DAU diperoleh t statistik sebesar 31.352354 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti DAU berpengaruh secara positif terhadap BD. Hal ini berarti semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Hasil uji signifikansi pada Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk PAD diperoleh t statistik sebesar 27.716602 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya jauh lebih kecil dari taraf

signifikansi yang ditolerir yakni 0,05, yang berarti PAD berpengaruh secara positif terhadap BD. Hal ini berarti semakin tinggi PAD maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pada Tabel di atas dijelaskan bahwa nilai koefisien standar beta DAU sebesar 0.603990 lebih besar dari koefisien standar beta PAD yaitu 0.533949 dan nilai t-statistic DAU sebesar 31.352354 lebih besar daripada PAD sebesar 27.716602 pada  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian, dapat diketahui bahwa signifikansi pengaruh DAU secara statistik lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap BD. Sehingga "Pengaruh DAUt-1 terhadap BDt lebih besar daripada pengaruh PADt-1 terhadap BDt.

### Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini besarnya kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh

variabel independen yaitu PAD dan DAU terhadap variabel dependennya yaitu BD dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi Adjusted R<sup>2</sup> (R<sup>2</sup> adj).

**Tabel 7**

**Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 <sup>a</sup>	.964	.963	224913352363.61917

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Tabel 7 di atas menunjukkan besarnya pengaruh DAU dan PAD terhadap BD ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0.963482 atau sebesar 96,3%. Hal ini berarti BD di Kabupaten/Kota di Jawa Barat 96,3% dapat dijelaskan oleh dana alokasi umum DAU dan pendapatan asli daerah (PAD).

**Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan output hasil olah data SPSS 22 uji t ditunjukkan dalam tabel 8 sebagai berikut :

1  
3

**Tabel 8****Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	319072472.890	24790270.491		12.871	.000
1 FLYPAPEREFECT	-.321	.054	-.466	-5.958	.000

a. Dependent Variable: DESFIK

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linier yang terdapat pada tabel 8 di atas maka, didapat persamaan tentang pengaruh *flypaper effect* terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:  $Y = 319072472.889502 - 0.321496FE + e$

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk *flypaper effect* diperoleh t statistik sebesar -5.957546 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal

**Tabel 9****Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	457542180.144	43259536.897		10.577	.000
1 FLYPAPEREFECT	-.539	.094	-.452	-5.727	.000

a. Dependent Variable: KMD

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linier yang terdapat pada tabel 9 maka, didapat persamaan tentang pengaruh *flypaper effect* terhadap rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :  $Y = 0.528 - 0.572FE + e$

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk *flypaper effect* diperoleh t statistik sebesar -5.726753 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh DAUt dan terhadap BDt**

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2002). "Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah (BD)t". Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka akan semakin meningkatkan belanja daerah. Hal ini, sesuai dengan hipotesisnya yang berbunyi Dana Alokasi Umum (DAU)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)t.

### **Pengaruh PADt terhadap BD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002), seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah,

dan lain-lain. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Semakin besar PAD akan semakin besar pula dana yang digunakan untuk belanja daerah.

"Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah (BD)t". Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin besar PAD akan semakin meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang berbunyi Pendapatan Asli Daerah (PAD)t-1 berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)t.

### **Pengaruh DAUt dan PAD t terhadap BDt**

*Flypaper Effect*, menurut Maimunah (2006) adalah suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri,

diprosikan dengan PAD. Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU t terhadap BD t dibandingkan dengan efek PAD t terhadap BD t.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah disajikan, tampak bahwa nilai t statistik DAU lebih besar daripada nilai t statistik PAD. Hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*, karena

sesuai dengan syarat pertama terjadinya *flypaper effect* yaitu bila nilai  $t$  statistik DAU lebih besar daripada nilai  $t$  statistik PAD. Hal ini berarti bahwa pemda merespon belanja lebih banyak atau boros menggunakan dana transfer (grants yang diproksikan dengan DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri (yang diproksikan dengan PAD). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh DAU  $t$  terhadap BD  $t$  lebih besar daripada PAD  $t$  terhadap BD  $t$  diterima.

### **Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Rasio Keuangan Pemda**

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio yang digunakan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Analisis pengaruh *flypaper effect* terhadap kinerja keuangan daerah dilakukan dengan meregresikan *flypaper effect* terhadap rasio keuangan. Dari hasil analisis, didapat bahwa *flypaper effect* berpengaruh terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Dari hasil analisis didapat bahwa *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap rasio desentralisasi fiskal. Pengaruh negatif *flypaper effect* terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal berarti bahwa terjadinya *flypaper effect* maka akan memperkecil rasio derajat desentralisasi fiskal, yang berarti semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Dari hasil analisis juga didapat bahwa *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Pengaruh negatif *flypaper effect* terhadap rasio kemandirian keuangan daerah berarti bahwa terjadinya *flypaper effect* maka memperkecil rasio kemandirian keuangan daerah, yang berarti semakin rendah kemandirian keuangan daerahnya. Berdasarkan hasil analisis dari rasio-rasio ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan terjadinya *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum dan PAD terhadap belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten /kota di Provinsi Jawa Barat menjadi menurun. Hal ini terlihat dari semakin rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah dan semakin tingginya ketergantungan keuangan daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tahun lalu berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan.
2. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun lalu berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan.

3. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tahun lalu dan Pendapatan Asli Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah tahun berjalan dan terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
4. Hasil Analisis Regresi untuk hipotesis keempat Hasil Pengujian hipotesis keempat yang tujuannya untuk mengetahui dampak *flypaper effect* terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Hal ini membuktikan bahwa *flypaper effect* berdampak pada penurunan kinerja keuangan daerah.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan lain yang lebih mendalam, misalnya dengan menggunakan field research dengan kuesioner dan wawancara dengan subjek

eksekutif dan legislatif daerah. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan daerah selama pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan penelitian berikutnya dapat membandingkan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amril, A., E. Erfit, dan M. Safri. 2015. *Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Jambi. Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah* (Vol. 2 No. 3).
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat*
- \_\_\_\_\_. 2007. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba empat.*
- Inayati, Nur Isna dan Doddy Setiawan. 2017. Fenomena *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (Vol. 1 No. 2).
- Karlina, Anis dan Nur Handayani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal*

- Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol.1 6 No. 3).
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Padang.
- Maimunah, Mutiara. Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera, *Simposium nasional Akuntansi IX*, Padang, 2006.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulya, Rahmatul dan Bustamam. 2016. Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh. *JIMEKA* (Vol. 1 No. 2)
- Oates, W.E. 1999. An Essay on Fiscal Federalis", *Journal of Economic Literature*, 37(3), September: 1120-49.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAl*, (Vol. 8 No. 2).
- Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suryono. 2015. Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 4 No. 9)
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang APBD
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan.

\_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia No 58 tahun 2005